

No. 10- Vol 2 - NOVEMBER 2006

ISSN : 1411 - 8114



J U R N A L I L M I A H  
**PADMA SRI KRESHNA**

Diterbitkan oleh  
**PUSAT PENERBITAN  
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM  
YOGYAKARTA**

**DAFTAR ISI**

<b>PELUANG BISNIS MELALUI FRANCHISE (SUATU TINJAUAN YURIDIS)</b> Erna Tri Rusmala Ratnawati .....	1
<b>ANALISIS PENGADAAN BAHAN BAKU INDUSTRI KERAJINAN SABUT KELAPA PT AKTCO KEBUMEN</b> Ilmardani Rince Ramli .....	11
<b>FRAMEWORK PRODUKTIVITAS DALAM SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT (SCRM)</b> Jono .....	21
<b>PENGGOLONGAN KREDIT BANK SYARIAH</b> Jumadi .....	34
<b>MARGINALISASI MASYARAKAT NELAYAN</b> Oktiva Anggraini .....	41
<b>UPACARA BERSIH DESA DI DESA NGOREYAN (Pendekatan Teori Struktural Fungsional)</b> Retno Kusumawiranti .....	50
<b>PENENTUAN JUMLAH TENAGA KERJA BERDASARKAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BAGIAN FINISHING DENGAN METODE SAMPLING KERJA (Studi Kasus di CV. Dewata Furni Exporter)</b> Siti Lestariningsih .....	58
<b>EFEKTIVITAS PENYALURAN SUBSIDI BBM PADA PETANI SALAK PONDOH, PEDAGANG KECIL DAN PENGRAJIN DI KABUPATEN SLEMAN</b> Heru Sudibya & Supriyadi .....	68
<b>STUDI FISIK RAGAM HIAS MIRONG MASJID AGUNG YOGYAKARTA</b> Sukirman .....	77
<b>KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDIDIKAN : DENGAN PERSPEKTIF GENDER DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b> Syakdiah .....	89

**MARGINALISASI MASYARAKAT NELAYAN**

Oktiva Anggraini

Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Widyadarmas Yogyakarta  
Dalem Mangkubumen KT. III/237 Yogyakarta

**ABSTRACT**

*The challenges and problems to lift up the quality of fisher's live hood and management coastal are quite complex. Those are several serious effort to manage these problems are indeed necessary. It's kind of strategies of poverty alleviation based on the utilization of local community's potential and empowerment of fishermen.*

**Keywords :** *local community's potential, fisher's live hood, empowerment*

**PENDAHULUAN**

Insiden kemiskinan secara faktual tidak dibatasi oleh aspek spasial dan sektoral, akan tetapi fakta empirik tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat miskin Indonesia berada di sektor pertanian dan perikanan. Kemiskinan dialami masyarakat pesisir yang tersebar di 42 kota dan 182 kabupaten di Indonesia. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa penduduk miskin mencapai 36,1 juta orang dan sebanyak 21,3 juta atau 58,8% bekerja di sektor pertanian dan lebih dari 15 juta penduduk miskin yang menggantungkan hidupnya sehari-hari pada sumber daya laut termasuk pesisir.

Pendapatan nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor sekitar Rp.885.000,- per tahun (70% dari hasil penangkapan ikan, 30% dari sumber pendapatan lain). Sedangkan pendapatan nelayan motor tempel sebesar Rp 1.180.000,- per tahun (73% dari hasil ikan, 27% dari sumber lain). Nelayan kapal motor berpendapatan Rp.1.918.000,- per tahun (78% dari usaha ikan, 22% dari sumber lain). Sumber lain berasal dari usaha tani, upah sebagai buruh,

usaha pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan lainnya (Hadi Poemomo dan Untung Prasetyono, 2002).

Kelangkaan modal dapat menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat nelayan yang sulit diputus. Dengan dasar itulah, sejak Repelita 1, serangkaian program kredit bagi masyarakat nelayan telah digulirkan pemerintah dan program terakhir yang cukup besar gaung dan dananya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP).

Hingga kini, PEMP telah dilaksanakan di 247 kabupaten/ kota di Indonesia dengan jumlah LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) kurang lebih 302 lembaga. Dengan sistem block grant dan bergantian untuk masing-masing wilayah pesisir, jumlah alokasi dana perguliran PEMP dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Di tahun 2004, perguliran dana sebesar 132.779.500 rupiah atau meningkat 14% dari tahun sebelumnya (DKP, 2004).

Sungguhpun perguliran dana kredit jauh lebih banyak pada program PEMP, capaian hasil

program tersebut dipandang masih belum sesuai dengan targetnya. *unsustainability* lembaga keuangan yang terbentuk setelah program selesai dapat terjadi karena rendahnya moralitas pelaksana, rendahnya tingkat pelunasan kredit dan rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat (Ashari, 2006). Riset Srimurni dari Bapenas (2002) dan Afrizal dari Universitas Andalas (2006), meski lokasi risetnya berbeda namun hasil riset keduanya senada menyatakan bahwa program pemberdayaan nelayan cenderung gagal di berbagai daerah. Program revolving fund, bantuan peralatan atau keuangan mikro dan infrastruktur dari waktu ke waktu di Sumatera Barat contohnya, 80% kelompok sasaran penelitian Afrizal menyatakan bahwa program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah tidak membawa perubahan signifikan dalam perekonomian keluarga.

Sementara Srimurni dalam risetnya menegaskan, perlunya sinergi pihak swasta dan perguruan tinggi serta pemerintah dalam program pemberdayaan dengan tetap mengedepankan konsep empat bina yakni bina manusia, bina sumber daya, bina lingkungan dan bina usaha dipadu dengan metode partisipatoris. Kesimpulan yang dapat ditarik senada, pemberdayaan yang mengesampingkan kearifan lokal dan penguatan institusi lokal hanya akan menyisakan sederet masalah. Yang semula mungkin bermaksud memberdayakan potensi pesisir namun justru semakin membuat masyarakat setempat kian miskin. Dengan dalih lebih mengoptimalkan pemberdayaan pesisir, permintaan peran serta PT. Mina Sinega oleh pemerintah Maluku Tenggara dapat menjadi penegasan *statement* di atas. Pulau Kei berikut

kepada pihak asing itu menjadikan suku Evav, penduduk asli pulau tersebut, justru terasing di bumi kelahirannya sendiri dan hidupnya kian miskin lantaran ketidakberdayaannya menghadapi pengurasan (*squeezing*) investor terhadap tanah ulayat mereka (Tempo, 12 Februari 1994). Riset yang dimotori USAID di Senggigi Lombok (1991) menunjukkan eksodusnya penduduk asli Senggigi dari kawasan pantai karena pola pemberdayaan nelayan dan potensi pesisir yang keliru dari pemda setempat. Penduduk asli tergusur ke hutan dan daerah marginal lain sementara posisi-posisi mereka digantikan oleh suku Jawa, Bali, Sasak yang berprofesi sebagai karyawan dan manajer hotel (Mucipto, 1995).

Bantuan yang diberikan pemerintah terhadap nelayan, sebenarnya tidak terbatas pada modal kerja. Bantuan dapat berupa pemberian subsidi bahan bakar minyak, kredit kapal, pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan dan tempat pelelangan ikan dan pelatihan atau pengenalan teknologi pengolahan ikan. Namun, lagi-lagi ketika bicara implementasinya yang cenderung gagal dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan, timbul persepsi seolah tidak ada cara lain untuk mengurai benang kusut yang namanya kemiskinan nelayan. Tulisan ini berupaya mengungkapkan kompleksitas kemiskinan keluarga nelayan dengan harapan ada terobosan-terobosan baru yang bisa dilakukan pemerintah dalam pengembangan model pemberdayaan nelayan di balik keterbatasan dana ya ktor sosial turut menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan

serta alasan-alasan lainnya seperti kurangnya prasarana umum di wilayah pesisir, lemahnya perencanaan spasial yang mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor pada satu kawasan, polusi dan kerusakan lingkungan.

Angka partisipasi sekolah anak-anak nelayan untuk pendidikan tingkat SLTP mencapai 60 %, dan SLTA baru mencapai 30 % ( Elfindri :2002 ). Sedangkan profil tingkat pendidikan masyarakat perikanan, sebagian besar tingkat pendidikan 79.05% tidak tamat SD, 17.59% tamat SD, 1.90% tamat SLTP, 1.37% tamat SLTA dan hanya 0.03% yang tamat Diploma dan Sarjana. Rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi terhadap penggunaan teknologi, penataan manajemen dan perbaikan perilaku (sumber: Perikanan sebagai Sektor Andalan, 2002).

Di lain sisi, masyarakat nelayan mengalami ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan buruh telah memberikan kontribusinya terhadap akumulasi kekayaan ekonomi pada sebagian kecil masyarakatnya yang memiliki alat produksi serta pihak yang menguasai modal dan pasar. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kehidupan yang melanda rumah tangga nelayan buruh tidak memungkinkan anggota keluarganya terlibat aktif dalam tanggung jawab sosial di luar permasalahan kehidupan yang substansial bagi mereka. Faktor yang demikian sering

secara negatif perilaku sosial masyarakat nelayan. Persepsi seperti ini hanya melestarikan kesenjangan hubungan sosial dalam relasi politik antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak menguntungkan untuk mendorong perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan reorientasi model kepemimpinan dan sasaran perencanaan pembangunan agar lebih kontekstual dan partisipatif (Arifin, 2004)

#### KENDALA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

Melihat kompleksitas masalah masyarakat pesisir, program-program pemupukan modal atau kredit mikro untuk nelayan menjadi alternatif solusi awal yang dilakukan pemerintah di samping membenah di bidang tata niaga, hukum dan penataan lingkungan. Beberapa contoh kasus yang menuntut perlunya membenah dalam bidang hukum adalah tumpang tindih yang dapat menimbulkan konflik antar departemen: 1) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan Departemen Perindustrian mengenai pengaturan industri pengolahan ikan; 2) DKP dengan Departemen Perdagangan mengenai pemasaran ikan; 3) DKP dengan Departemen Kehutanan mengenai pengelolaan taman nasional laut; 4) DKP dengan Departemen Perhubungan mengenai perizinan di pelabuhan; 5) DKP dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, mengenai pengaturan pasir laut. Perbenturan juga terjadi antara UU Nomer 24/1992 tentang Penataan Ruang dan UU Nomer 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dan perbedaan penataan ruang laut yang ekstrim tersebut dalam

UU tersebut akan berakibat fatal, tidak hanya menimbulkan konflik horizontal antar institusi negara dan akan menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat kecil dengan penguasa dan atau pengusaha. Lalu, sedikitnya ada 20 undang-undang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Akhmad Solihin dalam *Harian Sore Sinar Harapan*, 10 Juni 2005.

Tidaklah tepat bila selama ini muncul anggapan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir sebatas pemberian kredit, pengembangan pasca panen dan perbaikan tata niaga, mengingat ada sejumlah program yang tengah dirintis Departemen Kelautan dan Perikanan yang muaranya adalah memberdayakan potensi pesisir: Semangatnya program ini berupa peningkatan akses dan perlibatan penduduk seraya memperbaiki sistem pendukungnya yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Program ini meliputi kegiatan: pengembangan teknologi penangkapan ikan dan budidaya spesifik lokasi; sistem pengolahan hasil dan pemasaran; perbaikan sistem upah dan bagi hasil; pengembangan kegiatan ekonomi alternatif rumah tangga dan kelembagaan sosial masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi ekonomi; inventarisasi pulau-pulau kecil, gugusan pulau-pulau yang saling terkait, dan wilayah pesisir yang memiliki nilai-nilai geostrategis, di tingkat internasional, regional, nasional dan daerah hingga pengembangan fungsi pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kegiatan pendidikan, pengembangan pengetahuan dan fungsi sosial budaya.

Selama ini ada beberapa kendala

dilakukan melalui program Pemerintah yaitu: jangka waktu implementasi sangat pendek sementara dana yang harus disalurkan relatif besar, dan pada saat yang bersamaan tenaga lapangan sangat terbatas. Program Pemerintah selama ini menggunakan pendekatan participatory rural appraisal (PRA) yang membutuhkan tenaga fasilitator dalam jumlah yang banyak, agar mampu menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi kenyataannya ketersediaan tenaga fasilitator sangat terbatas.

Data penyuluh pertanian dan perikanan dari Pusbangluh Deptan (2000) menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluh pertanian didukung 37.322 orang dengan sebaran 30.586 orang (81,83%) di kecamatan/BPP, 5994 orang (16,06%) di kabupaten/BIPP, 702 orang (1,88%) di propinsi dan 60 orang (0,13%) di pusat. Dari jumlah itu, ketenagaan penyuluh perikanan belum ada data khusus bahkan ada Dinas Kelautan dan Perikanan belum ada tenaga khusus penyuluh perikanan. Kondisi akibat penataan kelembagaan ini cukup dilematis bagi kelancaran program-program pemberdayaan pesisir (Erlina, 2004).

Di samping kedua hal di atas, kendala pemberdayaan masyarakat melalui program Pemerintah adalah proses penyaluran dana mulai dari Pemerintah Pusat hingga penerima bantuan masih dihadapkan dengan mata rantai yang cukup panjang, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi penerima bantuan seperti musim maupun keadaan iklim. Dari sisi kebutuhan, program bantuan apapun yang digulirkan pemerintah atau funding bagi pengentasan kemiskinan seringkali tidak mengacu pada kebutuhan lokal dan telah dipatok oleh pemberi bantuan (Afrizal, 2005)

(Anggraini, 2006).

Pelaksana program pemberdayaan nelayan, dalam hal ini pemerintah cenderung menerjemahkan dan menerapkan program demi program sepotong-sepotong. Bukan sebagai suatu pekerjaan besar lintas sektoral. Potret pengelolaan dan penataan kawasan pesisir di negara Cina yang integratif, dapat menjadi contoh bahwa pengembangan kelautan dan perikanan bukan melulu pekerjaan Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebelum ada penataan ruang pesisir integratif dengan pengelolaan masyarakat pesisirnya, pendapatan wilayah pesisir Cina 4,33 milyar Yuan atau 5,109 trilyun rupiah. Namun begitu ada tata ruang yang lebih baik bagi investasi pariwisata, budidaya perikanan, restoran dan properti, pendapatan yang diperolehnya cukup fantastis, mencapai 7,87 milyar Yuan. Yang lebih menarik, wilayah pantai Cina hanya separuh dari luas pesisir Indonesia. (Kompas, 15 November 2006).

Di lain sisi, Indonesia dikenal sebagai wilayah pesisir terkumuh di dunia karena dipenuhi aneka sampah dan menjadi sentra pembuangan limbah sehingga antusiasme investor menanamkan modalnya di wilayah itu rendah. Pemberitaan ini menyodok posisi masyarakat pesisir yang sudah miskin. Ironisnya, penilaian demikian disampaikan oleh Direktur Pesisir dan Lautan DKP Irwandi Idris. Presepsi publik dapat beragam, di antaranya kekumuhan itu sebagai potret pengelolaan perikanan yang tumpah tindih & salah urus.

#### KEARIFAN LOKAL DAN INSTITUSI LOKAL

Kompleksitas rumah tangga nelayan amat berbeda bila dibandingkan dengan rumah tangga

pertanian. Rumah tangga nelayan memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan lautan (common property) sebagai faktor produksi, jam kerja yang harus mengikuti siklus bulan yaitu dalam 30 hari satu bulan yang dapat dimanfaatkan untuk melaut hanya 20 hari sisanya mereka relatif menganggur. Selain itu, ketiadaan jaminan atau asuransi kecelakaan pekerjaan dari profesinya sebagai nelayan juga mengandung arti pekerjaan ini hanya dapat dikerjakan oleh lelaki dan keluarga tidak dapat membantu secara penuh.

Dengan persoalan yang demikian tentunya kita harus memahami bahwa rumah tangga nelayan memerlukan perhatian yang multi dimensi. Tantangan yang terbesar adalah membangun sektor ini agar dapat mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir. Dengan logika yang lebih sederhana, setiap pemerintah hendak memberikan bantuan teknologi misalnya, hendaknya penerapan IPTEK terpadu untuk keluarga nelayan dapat menimbulkan aktivitas baru, berupa perluasan kesempatan kerja terkait, seperti contohnya penerapan teknologi pengeringan, kemasan, klinik usaha, manajemen pemasaran, keterkaitan institusi bisnis antara nelayan dengan pengusaha. Hal ini bisa tercapai manakala pembuat kebijakan memahami dari dekat kearifan lokal dan institusi lokal yang bisa diberdayakan sehingga program pengentasan kemiskinan dari pemerintah bergayung sambut.

Peranan kelompok masyarakat beserta para tokohnya dapat dijadikan sebagai dasar mendesain proses sosialisasi IPTEK tepat guna. Kearifan lokal di sini bukan kearifan tradisional.

Kearifan lokal penekanannya pada tempat, lokalitas dari kearifan tersebut sehingga kearifan lokal tidak harus merupakan kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul oleh suatu komunitas (Ahimsa, 2005). Inilah tantangan bagi pemerintah dan institusi lokal untuk tidak menyempitkan peran modal sosial.

Sementara itu, ketika pemerintah merancang perguliran modal melalui lembaga perbankan, prosedur hingga pencairannya pun hendaknya sederhana. Kewajiban debitur atau dalam hal ini nelayan memiliki persyaratan kepemilikan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKP (Surat Ijin Kapal Perikanan) dan adanya agunan akan menyurutkan minat nelayan untuk meminjam uang. Bila persyaratan ketat itu diterapkan, hanya nelayan juragan saja yang mampu mengambil kredit sedangkan nelayan buruh selamanya akan berstatus sebagai buruh dan upaya memutus rantai renternirpun menjadi sia-sia. Kelembagaan mikro yang seharusnya sebagai agen pembangunan pesisir selama ini justru lebih berfungsi sebagai agent of surplus appropriation. Untuk mengatasi hal ini, pemberian kredit modal maupun kapal melalui kelompok kecil dapat meminimalkan resiko besarnya tunggakan kredit nelayan karena mekanisme dan sanksi kelompoklah yang bermain.

Pembiayaan mikro yang dipelopori Grameen Bank di Bangladesh dan tengah ditiru di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia dapat menjadi alternatif penyaluran kredit untuk nelayan. Model ini melakukan substitusi dari kewajiban gabungan, akses terhadap pinjaman untuk masa yang akan datang

serta periode-periode pembayaran kembali cukup sering untuk jaminan tradisional. Alternatif terhadap jaminan ini secara khusus merupakan hal yang penting bagi peminjam yang tidak memiliki agunan serta bagi pemberi pinjaman yang beroperasi di negara-negara dengan ketentuan dan penegakan mengenai kepastian pinjaman yang lemah. Model ini cukup berkembang dan di tahun 2002 terdapat program pembiayaan mikro di seluruh dunia dengan jumlah peminjam mencapai 30 juta orang dan nilai pinjaman \$ 3,5 miliar dan rata-rata pinjaman sebesar \$ 280. Akan halnya di Indonesia, belum banyak daerah pesisir yang mengembangkan model ini (World Development Report, 2004).

Tanpa berusaha mengecilkan upaya pengentasan kemiskinan nelayan yang tengah dirintis pemerintah, keberhasilan pengembangan pesisir di sejumlah daerah di Indonesia patut dicermati. Keberhasilan nelayan Cilacap contohnya, KUD dan TPI di sana berperan dalam akses permodalan nelayan dan pemasaran hasil tangkap nelayan. Akibatnya, tercipta hubungan simetris terjadi antara nelayan juragan dan nelayan buruh. Hutang piutang mereka mulai bisa dipisahkan dengan keharusan buruh nelayan untuk menjual hasilnya kepada nelayan juragan. (Wahyono, 2001). Potret keberhasilan yang lain adalah program pemberdayaan wanita nelayan di desa Kemadang, pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul yang mampu memberikan stimulan untuk penguatan modal dan sekaligus kelompok wanita nelayan dalam mewujudkan wisata kuliner di wilayah tersebut. Di banding program serupa yang dilakukan di kabupaten Bantul dan kabupaten Kulon Progo yang justru macet kreditnya, perguliran modal

di wilayah ini cukup berhasil. Keberhasilan Program Pemberdayaan Wanita Nelayan khususnya dalam meningkatkan pendapatan wanita nelayan tidak luput dari sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kedinamisan kelompoknya yakni pemahaman anggota yang cukup baik terhadap 1) tujuan kelompok, 2) struktur kelompok, 3) fungsi tugas, 4) pembinaan kelompok, 5) kekompakan kelompok, 6) suasana kelompok, 7) tekanan pada kelompok berupa peringatan dan sanksi sosial dan 8) keefektifan kelompok. (Angraini, 2006).

Acungan jempol yang lain, patut diberikan pada pemerintah daerah Indramayu yang dapat memotivasi wanita nelayan dalam diversifikasi usaha bandeng tanpa duri hingga daerah tersebut kini terkenal dengan komoditi andalan bandeng tanpa duri. Penciptaan kawasan penunjang seperti kedai nelayan dan restoran, training packaging dan intervensi pemerintah dalam pemasarannya, mampu meningkatkan daya jual bandeng yang semula seribu rupiah menjadi lima ribu rupiah tanpa duri. Dengan ungkapan lain bahwa program pemberdayaan satu daerah dengan daerah lain tidak dapat diseragamkan, sebagai contoh: untuk daerah yang membutuhkan pola pengembangan diversifikasi usaha nelayan akan berbeda pola pemberdayaannya dengan model yang diterapkan pada masyarakat nelayan yang membutuhkan intensifikasi usaha perikanan (Wahyono, 2001).

Di lain sisi, sikap alergi perbankan terhadap investasi di bidang perikanan juga tidak akan menguntungkan dan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan. Besarnya kredit yang diterima sektor ini pada masa Orde Baru hanya

0,02 persen dari seluruh nilai kredit yang disalurkan pihak perbankan. Tingginya tingkat suku bunga yang dipatok perbankan untuk sektor perikanan juga menyulitkan para pengusaha. Berbeda dengan pengembangan sektor perikanan di Australia dan Thailand yang justru mendapat fasilitas bunga tiga hingga sembilan persen untuk sektor perikanan. Kecilnya kredit yang disalurkan di sektor perikanan menjadi salah satu sebab sedikitnya investasi di sektor ini. Menurut Deputi IV Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dipo Alam, penambahan investasi di bidang perikanan pada tahun 2001-2002 hanya berkisar 200 milyar rupiah (Kompas, 9 Maret 2003). Berdasarkan data statistik investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2000 turut memperlihatkan bahwa belum berpihaknya kondisi makro struktural kepada sektor perikanan. Nilai investasi domestik perikanan sejak 1967-1999 hanya 1,37 persen dari total investasi sebesar Rp.708 trilyun.

Ke depan, bila pemerintah konsisten menetapkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor yang mampu diandalkan untuk menyumbang pendapatan nasional, harus diikuti dengan kepedulian dan goodwill perbankan untuk turut mengembangkan pengelolaan dan penataan pesisir lebih baik.

## PENUTUP

Berangkat dari kondisi di atas maka setiap pemberdayaan masyarakat nelayan harus lebih dahulu diawali dengan identifikasi karakteristik yang melekat pada masyarakat nelayan menyangkut pola adaptasi sosial ekonomi, jaring

sosial dan karakteristik lingkungan sumberdaya yang menjadi tumpuan hidup mereka. Di atas semua itu, keberhasilan program pemberdayaan amat dipengaruhi oleh isi kebijakan, sumber daya dan dana, kersediaan target sasaran dan good will pemerintah yang dicerminkan dengan kesiapan perangkat birokrasi dan mensinergikan pihak lain (swasta ataupun NGO dan perguruan tinggi) yang terlibat dalam pengelolaan pesisir. Dengan demikian nilai akhirnya, posisi para nelayan terutama nelayan buruh tidak semakin termarginalkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal (2006) Pengentasan Kemiskinan Berbasis Institusi Lokal dalam *Kemajuan Terkini Penelitian Klaster Sosial Humaniora*, Jumina & Danang (Eds.) Yogyakarta: Wakil Rektor Bidang Penelitian dan PPM UGM UGM.
- Ahimsa Putra, H.S (2005) Etnosains, Etnotek dan Etnoart Paradigma Fenomenologis Untuk Revitaliasi Kearifan Lokal dalam *Kemajuan Terkini Penelitian Klaster Sosial Humaniora*, Jumina & Danang (Eds.) Yogyakarta: Kantor Wakil Rektor Bidang Penelitian dan PPM UGM.
- Anggraini, Oktiva (2006) Kajian Retro-spektif Program Pemberdayaan Wanita Nelayan di DIY dalam *Kemajuan Terkini Penelitian Klaster Sosial Humaniora*, Jumina & Danang (Eds.) Yogyakarta: Wakil Rektor Bidang Penelitian dan PPM UGM.
- Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, *Makalah dalam Sosialisasi Nasional Program MFCDP tanggal 22 September 2004.*
- Ashari (2006) Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya dalam *Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian, Volume 4 no.2, Juni, 2006.*
- Elfindri (2002) *Ekonomi Patron – Client : Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*, Andalas Press.
- ISPIKANI (2002) *Perikanan sebagai Sektor Andalan Nasional*, Ispikani Press. *Kompas*, 15 November 2006
- Kompas*, 9 Maret 2003
- Mei, Dwi Erlina dan Bambang GN ( 2004) Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan di Era Otonomi Daerah, dalam *Proceeding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan.*
- Mucipto, Iwan (1995) Pengembangan Industri Pariwisata di Lombok, Bagi Siapa? dalam *Negara dan Kemiskinan Daerah*, Didik (eds.), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sinar Harapan*, 10 Juni 2005.
- Soen'an Hadi Poemomo dan Untung Prasetyono (2002) *Pengembangan Sumber Daya* *Tempo*, 12 Februari 1994
- Wahyono, Ary (2001) *Pemberdayaan*

*Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta : Media  
Pressindo.

World Development Report (2004) A Better  
Investment Climate for Everyone: USA:  
IBRD